



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari
Telepon (0986) 2217088, Faksimile (0986) 2217087
Web: <http://bpkp.go.id>, email: papua.barat@bpkp.go.id

NOTA DINAS

Nomor: OT.04/ND-07/PW27.2/2022

Yth. : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Dari : Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Bidang Instansi Pemerintah Pusat
(IPP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/01/2022 tentang Petunjuk Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Tahun 2022 Nomor OT.04/LKJ-08/PW27.2/2022 tanggal 30 Januari 2023.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

30 Januari 2023

Korwas Bidang IPP

Muhammad Irwandi

Tembusan Yth.:

1. Kepala Bagian Umum Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
2. Korwas di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Laporan Kinerja

Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Pusat

Tahun 2022



Nomor : OT.04/LKJ-08/PW27.2/2022
Tanggal: 30 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan cascading dan menetapkan Perjanjian Kinerja untuk seluruh Koordinator Pengawasan dan Kepala Bagian Umum.



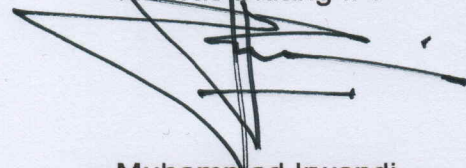
Laporan Kinerja Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan media akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Koordinator Bidang Pengawasan IPP Tahun 2022.

Penyajian Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/ 01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Semoga laporan kinerja Tahun 2022 Bidang IPP ini bisa memberikan manfaat bagi Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan evaluasi kinerja dan menetapkan langkah strategis untuk peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun mendatang.

Manokwari 30 Januari 2023

Korwas Bidang IPP



Muhammad Irwandi

19680528 198903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja Bidang IPP. Revisi Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP merupakan tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan penugasan yang ditetapkan dalam PKPT.

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

Tugas dan fungsi Bidang IPP adalah melaksanakan kebijakan pengawasan khususnya yang berasal dari rendal Kedeputian Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dan rendal Kedeputian Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan lintas sektoral Bidang Perekonomian.
2. Pengawasan atas permintaan *stakeholder* Bidang Perekonomian.
3. Pengawasan atas proyek pinjaman hutang luar negeri (PHLN).
4. Pengawasan lintas sektoral Bidang Polhukam PMK.
5. Pengawasan Bendahara Umum Negara Bidang Polhukam PMK.
6. Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polhukam PMK.
7. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.
8. Optimalisasi penerimaan negara.
9. Pengawasan atas permintaan *stakeholder* Bidang Polhukam PMK.
10. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

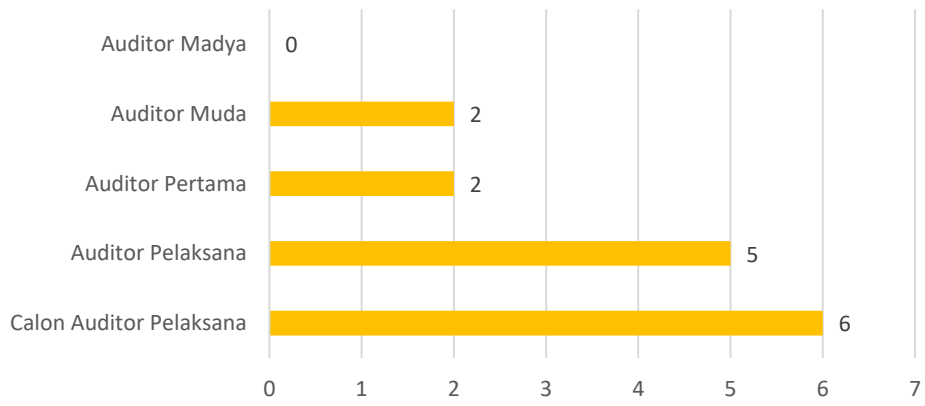
Bidang IPP dipimpin oleh Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perwakilan BPKP.

Saat ini Korwas Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dijabat oleh Muhammad Irwandi sejak tanggal 3 Oktober 2021 berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-462/K/SU/2021 tanggal 6 September 2021.

Jumlah pegawai Bidang IPP per 31 Desember 2022 sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Muhammad Syaifudin	Penata/IIIc	Auditor Muda
2	Mochamad Munasir	Penata/IIIc	Auditor Muda
3	Andi Fachrur Rijal	Penata Muda/IIIa	Auditor Pertama
4	Frida Bugis	Penata Muda/IIIa	Auditor Pertama
5	Maulana Elen Yudha Shugara	Pengatur Tingkat I/IIId	Auditor Pelaksana
6	Faridhio Iqbal Ramadhan	Pengatur Tingkat I/IIId	Auditor Pelaksana
7	Tzakka Aulia	Pengatur Tingkat I/IIId	Auditor Pelaksana
8	Nafidziya Maharani	Pengatur Tingkat I/IIId	Auditor Pelaksana
9	Mukhamad Ilham Aji Laksono	Pengatur/IIc	Auditor Pelaksana
10	Glenn Claudio Restuondi Pasaribu	CPNS/IIc	Calon Auditor Pelaksana
11	Hafidz Taufiqurrahman Bangsawan	CPNS/IIc	Calon Auditor Pelaksana
12	Juan Marthin Nainggolan	CPNS/IIc	Calon Auditor Pelaksana
13	Muhammad Iqbal Miftahul Alwi	CPNS/IIc	Calon Auditor Pelaksana
14	Muhammad Muarif	CPNS/IIc	Calon Auditor Pelaksana
15	Yohanes Dani Darmawan	CPNS/IIc	Calon Auditor Pelaksana

Diagram Jabatan Pegawai



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPKP yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 diformulasikan dalam visi BPKP, yaitu Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan misi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan penjabaran dari program strategis sesuai visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Visi dan misi serta tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020 – 2024. Program untuk menunjang kegiatan tersebut terdiri dari program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan program dukungan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan tahun 2020 – 2024 terdiri dari 6 sasaran kegiatan dengan 45 indikator kinerja yang terdiri dari 32 indikator kinerja kegiatan pengawasan (delivery) dan 13 indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (enabler).

Dari 32 indikator kinerja kegiatan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2000 – 2024, Bidang IPP memiliki 3 (tiga) IKK yang terdiri dari:

No	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	1.123	186.779	54.487	136.270	112.930
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembanguna Strategis Nasional						
	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah PSN	1	1	1	1	1
	Persentasi Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen (%)			80		

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Korwas Bidang IPP sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP dengan Korwas Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, dilakukan penilaian indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja tersebut menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota Bidang IPP untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran kegiatan dengan menetapkan target indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Bidang IPP memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	9.039,00
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah PSN	1
		Persentasi Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengumpulkan data kinerja yang merupakan capaian realisasi indikator kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, informasi yang mendukung/menghambat capaian kinerja, capaian realisasi dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan, serta upaya peningkatan kinerja ke depan. Data kinerja yang diperoleh diharapkan menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, efisiensi, serta efektivitas.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Hasil pengukuran indikator kinerja Bidang IPP Tahun 2022 menunjukkan bahwa ketiga target telah tercapai dengan nilai rata-rata capaian sebesar 112,11%. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	9.039,00	12.324,15	136,34%
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah PSN	1	1	100,00%
		Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	80	100	125,00%

Realisasi kinerja Tahun 2022 berdasarkan sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Uraian indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Bidang IPP adalah nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah.

Indikator kinerja nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menghitung jumlah nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat. Nilai efisiensi pengeluaran

negara/daerah yang dimaksud yaitu nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang tidak tepat berdasarkan hasil kegiatan pengawasan BPKP.

Realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp12.324.157.111,89 atau mencapai 136,34% dari target sebesar Rp9.039.000.000,00. Rincian nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Nilai
		(Rp)
1	Audit atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	573.618.468,89
2	Audit Keuangan Program National Slum Upgrading Program (NSUP) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	13.300.000,00
3	Reviu Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	3.414.819.091,00
4	Evaluasi Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.007.072.552,00
5	Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)	1.309.587.000,00
6	Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP)	5.760.000,00
	Jumlah	12.324.157.111,89

Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah tersebut diperoleh atas hasil pengawasan sesuai PKPT bidang IPP yang mendukung beberapa sektor APP antara lain sebagai berikut:

- a. Audit atas laporan keuangan atas proyek yang dibiayai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri;
- b. Pengawasan atas program/kegiatan pada Kementerian PUPR;
- c. Pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah;
- d. Pengawasan atas Program Indonesia Pintar.

2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Uraian indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Bidang IPP adalah Jumlah PSN yang tercapai sesuai target dan Persentasi Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target dihitung berdasarkan jumlah Proyek Prioritas Nasional (PSN) ditargetkan tercapai

yang dilakukan pengawasan oleh BPKP. Pada tahun 2022 terdapat 1 PSN yang ditargetkan tercapai dan dilakukan revidu tata kelola oleh Perwakilan



BPKP Provinsi Papua Barat yaitu pembangunan Bandara Siboru Kabupaten Fakfak. Namun, pembangunan tersebut masih belum selesai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Realisasi jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) tercapai sesuai target yang dilakukan pengawasan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1

(satu) PSN atau mencapai 100% dari target sebanyak 1 PSN yaitu pengawasan atas pembangunan Bandara Siboru Kabupaten Fakfak.

b. Persentasi Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Indikator persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan proporsi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh pengawasan BPKP. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2022 dan belum ditargetkan pada Perkin tahun sebelumnya maupun Renstra 2020 – 2024.

Bidang IPP Melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu pada 3 tiga) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu KPU Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Kaimana.

Realisasi persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah sebanyak 80% atau mencapai 100% dari target sebanyak 80%. Selama tahun 2022 Bidang IPP telah memberikan rekomendasi strategis sebanyak 3 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti, diantaranya sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan Manajemen Risiko (MR) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Kaimana;
2. Penetapan kebijakan Manajemen Risiko (MR) pada Pemerintah Kabupaten Kaimana; dan
3. Mendorong KPU Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Kaimana menerapkan pengelolaan risiko dari identifikasi

risiko dan pengendaliannya hingga menyusun rencana aksi pengendalian atas risiko.

Nilai realisasi indikator kinerja tersebut diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang IPP sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas, yaitu Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak Provinsi Papua Barat Triwulan II dan IV Tahun 2022 serta PKPT Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan PSN di wilayah Papua Barat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan FGD dengan pihak-pihak pelaksana PSN dalam mengoptimalkan pelaksanaan PSN dan menyelesaikan permasalahan pelaksanaan PSN;
- e. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan PSN serta memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan tersebut;
- f. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian rekomendasi perbaikan oleh pihak terkait secara berkala.

B. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp3.469.116.000,00 atau 47,35% dari total anggaran Perwakilan sebesar Rp7.325.692.000,00.

Realisasi anggaran Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp3.465.601.760,00 atau terserap 99,90% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.469.116.000,00.

Rincian Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Lampiran 1.

C. Capaian Kinerja lainnya (PKPT)

Selama tahun 2022, Bidang IPP telah melaksanakan 49 PKPT dan telah menerbitkan 166 Surat Tugas. Per 31 Desember 2022 telah diterbitkan laporannya sebanyak 166 laporan atau 100% dari surat Tugas yang terbit.

Rincian output dari 49 PKPT tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. PKPT APP - Pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah
Output:

- a. Laporan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Madrasah pada Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021.
 - b. Laporan Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
 - c. Laporan Hasil Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Papua Barat.
2. PKPT - Pengawasan atas Program Indonesia Pintar
- Output:
- a. Laporan Hasil Pemantauan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Menengah Jenjang SMA dan SMK pada Triwulan I Tahun 2022 di Kabupaten Manokwari.
 - b. Laporan Hasil Pemantauan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Triwulan I Tahun 2022 pada Universitas Papua.
 - c. Laporan Pemantauan atas Percepatan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah Triwulan I Tahun 2022 di Kabupaten Manokwari.
 - d. Laporan Monitoring Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar Triwulan I Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
 - e. Laporan Evaluasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP Tahun 2021-2022 pada Kabupaten Manokwari.
 - f. Laporan Evaluasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Menengah Jenjang SMA dan SMK Tahun 2021-2022 pada Provinsi Papua Barat.
 - g. Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Tahun 2022 pada Universitas Papua.
 - h. Laporan Evaluasi PIP Madrasah Tahun 2021-2022 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong.
 - i. Laporan Hasil Evaluasi Program Indonesia Pintar Madrasah Pada Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2022.

3. PKPT - Pengawasan Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Lingkungan Kemendikbud
Output:
 - a. Laporan Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Jenjang Perguruan Tinggi pada Politeknik Negeri Fakfak Tahun 2021-2022.
 - b. Laporan Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Jenjang SMK pada Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022.
4. PKPT - Pengawasan atas Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) Program Penyediaan Infrastruktur TIK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Output:
 - a. Laporan Survei Pendahuluan Pengawasan Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) dan Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet pada Provinsi Papua Barat.
 - b. Laporan Reviu atas Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Tahun 2022 dan Infrastruktur Pendukungnya.
 - c. Laporan Koordinasi dan FGD Hasil Pengawasan APP dan APPD Tahun 2022 dan Strategi APP Tahun 2023 Lingkup Kedeputan Bidang IPP Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta.
 - d. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Reviu Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) dan Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat.
 - e. Laporan Pemantauan Pendistribusian Alat Bantu Penerimaan Siaran Digital (Set Top Box) yang Berasal dari Bantuan Pemerintah kepada Rumah Tangga Miskin Tahun 2022 pada Kota Sorong.
5. PKPT - Pengawasan atas Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet Program Penyediaan Infrastruktur TIK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Output:
 - a. Laporan Reviu atas Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten Sorong.
 - b. Laporan Pelatihan Transformational Leadership.
6. PKPT - Pengawasan atas Program Percepatan Peningkatan Kesejahteraan pada Provinsi Papua/Papua Barat
Output:

- a. Laporan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.
 - b. Laporan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.
 - c. Laporan Pengumpulan Data terkait Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat pada Kabupaten Manokwari Selatan.
 - d. Laporan Pengumpulan Data Terkait Pengendalian Inflasi Daerah pada Provinsi Papua Barat.
 - e. Laporan Konsultasi Hasil Pengawasan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua Barat.
 - f. Laporan Pemantauan atas Program Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Papua Barat pada Kota Sorong.
 - g. Laporan Reviu Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Triwulan IV Tahun 2022.
7. PKPT - Pengawasan atas Implementasi Reformasi Birokrasi

Output:

- a. Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Mendukung Kemudahan Berusaha pada Kabupaten Teluk Wondama.
- b. Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Anggaran 2022 pada Kabupaten Fakfak.
- c. Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Mendukung Kemudahan Berusaha pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- d. Laporan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari.
- e. Laporan Kegiatan Sosialisasi Penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari.
- f. Laporan Konsultasi Pengawasan Sektor Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.
- g. Laporan Sosialisasi SPIP di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari.

8. PKPT - Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TNI/Polri
Output:
 - a. Laporan Monitoring Hasil Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid-19 pada Fasyankes di Wilayah Kepolisian Daerah Papua Barat per 31 Desember 2021.
 - b. Laporan Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Polda Papua Barat.
 - c. Laporan Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan TNI se-Papua Barat.
9. PKPT - Pengawasan atas Padat Karya Penanaman Mangrove
Output:
 - a. Laporan Reviu Program Padat Karya Tahun 2022 pada Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Provinsi Papua Barat.
 - b. Laporan Hasil Reviu Program Padat Karya Tahun 2022 pada Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Provinsi Papua Barat.
 - c. Laporan Exit Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2021 serta Konsultasi Pengawasan Padat Karya dalam rangka mendukung pengawasan Kemiskinan Ekstrem.
 - d. Laporan Exit Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2021 serta Konsultasi Pengawasan Padat Karya dalam rangka mendukung pengawasan Kemiskinan Ekstrem.
 - e. Laporan Konsultasi Pengawasan Kegiatan Padat Karya Tahun 2022 pada Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
 - f. Laporan Kegiatan Konsultasi Pengawasan Optimalisasi Program Padat Karya Triwulan IV Tahun 2022.
10. PKPT - Pengawasan atas Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun) di Provinsi Papua Barat
Output:
 - a. Evaluasi atas Kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.

- b. Laporan Hasil Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Penguatan Infrastruktur dan konektivitas Tahun Anggaran 2023.
11. PKPT - Pengawasan atas pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Barat
- Output:
- a. Laporan Hasil Reviu Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Abrasi Pantai Wedoni di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.
 - b. Laporan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Provinsi Papua Barat.
 - c. Laporan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Jembatan pada Provinsi Papua Barat.
 - d. Laporan Perpanjangan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Provinsi Papua Barat.
 - e. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang IPP pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
12. PKPT - Pengawasan atas Optimalisasi Program Padat Karya pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan di Provinsi Papua Barat
- Output:
- a. Laporan Reviu Optimalisasi Program Padat Karya Triwulan III Tahun 2022 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Bara.
 - b. Laporan Reviu Optimalisasi Program Padat Karya Triwulan III Tahun 2022 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat.
 - c. Laporan Pemantauan Optimalisasi Padat Karya Triwulan IV dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat pada Kota Sorong.
 - d. Laporan Konsultasi Penyusunan Rencana Teknis Pengawasan dan Rencana Kerja Bidang IPP Tahun 2023.
 - e. Laporan Konsultasi Pengawasan Program Padat Karya serta Pencegahan Korupsi Indonesia dan Bedah Buku.
 - f. Laporan Konsultasi Perencanaan APP 2023 Sektor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

13. PKPT - Pengawasan atas Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
Output:
Laporan Evaluasi Atas Program Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 pada Kabupaten Fakfak.
14. PKPT - Pengawasan atas Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan
Output:
a. Laporan Monitoring Harga Minyak Goreng dan Tandan Buah Segar Sawit di Provinsi Papua Barat.
b. Laporan Evaluasi Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan Keperantaraan Tahun 2022 pada Kabupaten Sorong.
c. Laporan Pemantauan Hasil Pengawasan atas Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan, dan Keperantaraan pada Kabupaten Sorong.
15. PKPT - Pengawasan atas Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022
Output:
a. Laporan Reviu Pengadaan PPPK Guru Tahun 2021 dan Perencanaan Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 di Pemerintah Provinsi Papua Barat.
b. Laporan Reviu Pengadaan PPPK Guru Tahun 2021 dan Perencanaan Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
c. Laporan Konsultasi pengawasan penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Workshop Integrated Talent Management System (ITMS) di Jakarta.
d. Laporan Reviu Pengadaan PPPK Guru Formasi Tahun 2021 Tahap Pengangkatan dan Perencanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
e. Laporan Reviu Pengadaan PPPK Guru Formasi Tahun 2021 Tahap Pengangkatan dan Perencanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari.
f. Laporan Pengawasan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat.
g. Laporan Pendalaman Pengawasan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat.

16. PKPT - Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021
- Output:
- a. Laporan Kegiatan kick off meeting Pelaksanaan Audit Kinerja BPKP Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sesuai Surat Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: PE.02.02/S-367/D1/03/2022 tanggal 7 Juni 2022.
 - b. Laporan Audit Kinerja Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Manokwari.
17. PKPT - Pengawasan atas Pembangunan Bandara pada Satker Kementerian Perhubungan di Provinsi Papua Barat
- Output:
- Laporan Perpanjangan Penugasan Evaluasi atas Pembangunan Bandar Udara Siboru di Fakfak Tahun 2022.
18. PKPT - Pengawasan atas Program/Kegiatan pada Kementerian PUPR
- Output:
- a. Laporan Pengawasan atas Program/Kegiatan pada Kementerian PUPR.
 - b. Laporan Reviu atas Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Abrasi Pantai Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021.
 - c. Laporan Reviu Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Abrasi Pantai Wedoni di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.
19. PKPT - Reviu Tata Kelola PSN Periode Triwulan IV Tahun 2021 atas PSN program pemerataan ekonomi (SHAT)/ TORA
- Output:
- a. Laporan Reviu Tata Kelola PSN Sertifikasi Lahan (SHAT) Triwulan IV Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat.
 - b. Laporan Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada Provinsi Papua Barat Triwulan IV Tahun 2022.
 - c. Laporan Monitoring atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Kelapa Dalam Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat.

20. PKPT - Pengawasan atas Program Penanggulangan Bencana
Output:
Laporan Evaluasi Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Manokwari Tahun 2022.
21. PKPT - Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial
Output:
Laporan Monitoring atas Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako Periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat.
22. PKPT - Pengawasan atas Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)
Output:
Laporan Evaluasi Penanggulangan Bencana pada Kota Sorong Tahun 2022.
23. PKPT - Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Output:
a. Laporan Reviu Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Ajaran 2021-2022 pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Papua Barat.
b. Laporan Reviu Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Ajaran 2021-2022 pada Jenjang Pendidikan Dasar pada Kota Sorong.
24. PKPT - Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu
Output:
a. Laporan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
b. Laporan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kaimana.
c. Laporan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua Barat.
25. PKPT - Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Primer
Output:
a. Laporan Konsultasi Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Primer di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
b. Laporan Evaluasi Transformasi Sistem Kesehatan Layanan Primer pada Provinsi Papua Barat.

26. PKPT - Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan
Output:
- a. Laporan Evaluasi Transformasi Sistem Kesehatan Layanan Rujukan Pada Provinsi Papua Barat.
 - b. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Audit Klaim Covid-19 pada RS di Wilayah Kota Sorong Tahun 2022.
27. PKPT - Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan
Output:
- a. Laporan Evaluasi Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan pada Provinsi Papua Barat.
 - b. Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Dana Kapitasi di FKTP Milik Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
 - c. Laporan Konsultasi Anggaran Pengawasan Bidang IPP Sektor Reformasi SDM pada KPPN Sorong.
28. PKPT - Pengawasan atas Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaatn Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)
Output:
- a. Laporan Evaluasi Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022 Pada Dinas Sosial Kabupaten Manokwari.
 - b. Laporan Mengikuti kegiatan Rapat Koordinator Teknis Pengawasan Intern Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah sesuai Surat Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: PE.09.01/Und-251/D2/01/2022 tanggal 27 April 2022.
29. PKPT - Pengawasan atas Implementasi BANSOS APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)
Output:
Laporan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II Tahun 2022 dan Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng Periode Bulan April-Juni Tahun 2022.
30. PKPT - Pengawasan atas Penurunan Beban Pengeluaran - PKH
Output:
- a. Laporan Konsultasi Program Kemiskinan Ekstrim dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Semester II Tahun 2022.

- b. Laporan Melaksanakan Survei Harga dalam rangka Pengendalian Inflasi pada Kabupaten Manokwari.
- c. Laporan Pengendalian Dampak Inflasi Periode Triwulan III Tahun 2022 pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- d. Laporan Pemantauan atas Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV Tahun 2022 pada Kota Sorong.
- e. Laporan Monitoring Penetapan Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem dan Penyusunan Program/Kegiatan Tahun 2023 dalam Rangka Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- f. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial Tahun 2022.
- g. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial Tahun 2022.

31. PKPT - Pengawasan atas Penurunan Beban Pengeluaran - Kartu Sembako

Output:

- a. Laporan Koordinasi Pengawasan Sektor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dengan APIP di Kabupaten Sorong.
- b. Laporan Evaluasi atas Implementasi Strategi Penurunan Beban Pengeluaran dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Kabupaten Manokwari.
- c. Laporan Evaluasi atas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan September-Oktober Tahun 2022 pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- d. Laporan Pemantauan atas Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Pengendalian Dampak Inflasi Periode Triwulan III Tahun 2022 pada Kabupaten Pegunungan Arfak.
- e. Laporan Pemantauan Percepatan Penyaluran BLT BBM dan Survey Harga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Kota Sorong.
- f. Laporan Monitoring Bantuan Subsidi Upah Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat.
- g. Laporan Monitoring Harga Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat.
- h. Laporan Monitoring Harga Minyak Goreng di Kota Sorong.

32. PKPT - Pengawasan atas Penurunan Beban Pengeluaran - Kartu Indonesia Sehat
Output:
Laporan Evaluasi Kartu Indonesia Sehat Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat.
33. PKPT - Pengawasan atas Peningkatan Pendapatan - Peningkatan akses Permodalan
Output:
Laporan Evaluasi atas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Semester II Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2022 pada Kabupaten Manokwari.
34. PKPT - Pengawasan atas Peningkatan Pendapatan - Peningkatan Aset Produktif
Output:
a. Laporan Evaluasi atas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Topik Peningkatan Aset Produktif Tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Sorong.
b. Laporan Evaluasi atas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Topik Peningkatan Aset Produktif Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kabupaten Raja Ampat.
35. PKPT - Pengawasan atas Penanganan Covid-19-Vaksinasi
Output:
a. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahap I pada Fasyankes Kabupaten Manokwari dan Fasyankes Vertikal di Wilayah Kabupaten Manokwari per 28 Februari 2022.
b. Laporan Kompilasi dan Penjaminan Mutu Hasil Pengawasan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahap I pada Dinas Kesehatan di Wilayah Provinsi Papua Barat.
c. Laporan Pengawasan Vaksinasi Covid-19 Triwulan II Tahun 2022 di Wilayah Provinsi Papua Barat.
d. Laporan Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Triwulan II Tahun 2022 pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Kota Sorong.
e. Laporan Konsultasi tentang Pengawasan Penanganan Covid-19 pada Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan Tahun 2022.

- f. Laporan Monitoring Pengelolaan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kadaluwarsa di Daerah Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat.
 - g. Laporan Monitoring Vaksin Covid-19 dan Pengelolaan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kedaluarsa Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat.
36. PKPT - Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim Rumah Sakit
- Output:
- Laporan Audit Tujuan Tertentu atas Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19 periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong.
37. PKPT - Pengawasan atas Stimulus Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi COVID-19 pada Kemenparekraf/Baparekraf
- Output:
- Laporan Pemetaan dan Identifikasi Hambatan atas Bantuan Stimulus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
38. PKPT - Audit atas laporan keuangan atas proyek yang dibiayai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri
- Output:
- a. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat / PAMSIMAS III (Loan IBRD No. 8578-ID) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2021.
 - b. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat / PAMSIMAS III (Loan IBRD No. 8578-ID) pada Kabupaten Manokwari untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2021.
 - c. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat / PAMSIMAS III (Loan IBRD No. 8578-ID) pada Kabupaten Sorong untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2021.
 - d. Laporan Workshop Sosialisasi Revisi Juklak dan Kick Off Audit Keuangan National Slum Upgrading Project (NSUP)/Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun Anggaran 2021.
 - e. Laporan Audit Keuangan National Slum Upgrading Project (NSUP)/Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pada Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021.

- f. Laporan Audit Keuangan Program National Slum Upgrading Program (NSUP)/Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada Kota Sorong Tahun Anggaran 2021.
 - g. Laporan Workshop Evaluasi dan Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP Program PAMSIMAS Tahun 2022 Regional 2.
 - h. Laporan Rapat koordinasi Provinsi dan Koordinasi Awal KOTAKU TA 2022.
39. PKPT - Verifikasi Disbursement Linked Indicators (DLI) atas program yang dibiayai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri

Output:

- a. Laporan Verifikasi Dukungan atas Pencapaian DLI I-SPHERE Loan 8873-ID Tahun 2022 di Kabupaten Raja Ampat.
 - b. Laporan mengikuti Sosialisasi Pedoman Verifikasi Capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Investing in Nutrition and Early Years Program (Program Strategi Percepatan Penurunan Stunting) Tahun 2021 di Denpasar.
 - c. Laporan Verifikasi Capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Investing in Nutrition and Early Years Program (Program Strategi Percepatan Penurunan Stunting) Tahun 2021 pada Kabupaten Raja Ampat.
 - d. Laporan Verifikasi Capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Investing in Nutrition and Early Years Program (Program Strategi Percepatan Penurunan Stunting) Tahun 2021 pada Kabupaten Manokwari Selatan.
40. PKPT - Reviu Tata Kelola PSN Periode Triwulan IV Tahun 2021 atas PSN Kawasan Industri Teluk Bintuni

Output:

- a. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APP Triwulan I dan II serta Rencana Pengawasan Triwulan III dan IV Tahun 2022 sesuai Surat Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: PE.11.02/UND-319/D1/05/2022 tanggal 24 Mei 2022.
- b. Laporan Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kawasan Industri Teluk Bintuni Triwulan II Tahun 2022.
- c. Laporan Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak Provinsi Papua Barat Triwulan II Tahun 2022.
- d. Laporan Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak Provinsi Papua Barat Triwulan IV Tahun 2022.

- e. Laporan Koordinasi dan Konsultasi Tentang Pelaksanaan Pengawasan PSN dengan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
 - f. Laporan Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kawasan Industri Teluk Bintuni Triwulan IV Tahun 2022.
41. PKPT - Pengawasan Proyek Prioritas Strategis Kawasan Industri (Proyek Prioritas Strategis/Major Project)
- Output:
- a. Laporan Survei atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong Triwulan III Tahun 2022.
 - b. Laporan Pemantauan atas Proyek Prioritas Strategis pada Kawasan Industri Teluk Bintuni Tahun 2022.
42. PKPT - Pengawasan Proyek Prioritas Strategis Destinasi Pariwisata Prioritas
- Output:
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Major Project/Proyek Prioritas Strategis pada Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
43. PKPT - Pengawasan atas pembangunan bandara/pelabuhan pada Satker Kementerian Perhubungan di Provinsi Papua Barat
- Output:
- Laporan Perpanjangan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat pada Kabupaten Fakfak.
44. PKPT - Optimalisasi Pemanfaatan KPBU
- Output:
- a. Laporan Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Provinsi Papua Barat.
 - b. Laporan Pengawasan Optimalisasi Pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Kabupaten Manokwari.
 - c. Laporan Konsultasi Pengawasan Optimalisasi KPBU Provinsi Papua Barat ke Direktorat Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan.
45. PKPT - Pengawasan atas Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan Tahun 2022 (Monitoring 1 ST dan Reviu 2 ST)
- Output:
- a. Laporan Monitoring Percepatan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) TNI-POLRI Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi Papua Barat.

- b. Laporan Monitoring Percepatan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) POLRI Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Polda Papua Barat.
- c. Laporan Reviu Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) TNI, Monitoring Progres Bantuan Tunai Pangan (BLT Minyak Goreng), dan Monitoring Persediaan Obat Bhakti TNI Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi Papua Barat.
- d. Laporan Reviu Percepatan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) dan Monitoring Progres Bantuan Tunai Pangan (BLT Minyak Goreng) Tahun Anggaran 2022 pada Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat.
- e. Laporan Konsultasi terkait Pengawasan atas Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua Barat dan Mengikuti Rapat Kerja BPKP Tahun 2022.
- f. Laporan Evaluasi atas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan November-Desember Tahun 2022 pada Kota Sorong.

46. PKPT - Pengawasan KIP Kemiskinan Ekstrem

Output:

- a. Laporan Pemantauan atas Program Kartu Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kota Sorong.
- b. Laporan Evaluasi Kebermanfaatan Program Indonesia Pintar dalam Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Ekstrem Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.
- c. Laporan Evaluasi Kebermanfaatan Program Indonesia Pintar dalam Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Ekstrem Tahun 2022 dan Pemantauan Bantuan TIK Tahun 2021/2022 pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Sorong.
- d. Laporan Evaluasi Kebermanfaatan Program Indonesia Pintar dalam Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Ekstrem Tahun 2022 dan Pemantauan Bantuan TIK Tahun 2021/2022 pada Provinsi Papua Barat.

47. PKPT - Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting pada Provinsi dan Kab/Kota
- Output:
- a. Laporan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 pada Kabupaten Sorong Selatan.
 - b. Laporan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat.
 - c. Laporan Pemantauan atas Progress Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat.
48. PKPT - Pengawasan atas P3DN Nasional (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)
- Output:
- a. Laporan Monitoring Program Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kota Sorong.
 - b. Laporan Reviu Pelaksanaan Program P3DN Triwulan IV pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.
 - c. Laporan Konsultasi Pengawasan P3DN dan Monitoring Pengawasan APP Triwulan IV Tahun 2022 serta Rencana APP Deputy Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tahun 2023 di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Laporan Koordinasi Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rapat Kerja BPKP Tahun 2022 di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
 - e. Laporan Monitoring Realisasi Dana Mitra Kegiatan Pendampingan Audit Kinerja Itwasda Polda Papua Barat Tahap I dan Tahap II pada Satker Polda Papua Barat dan Polres Jajaran Tahun Anggaran 2022
49. PKPT - Reviu Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru dan Pengawas PNS PAK pada Kementerian Agama
- Output:
- Laporan Reviu Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Kristen PNS pada Sekolah yang diangkat Kementerian Agama bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2021 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tujuan yang dimandatkan oleh BPKP.

Laporan kinerja (LKj) ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2020-2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bidang IPP Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Bidang IPP Tahun 2022 yang telah ditetapkan, merupakan *cascading* dari Perkin Kepala Perwakilan yaitu sebanyak 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada 2 sasaran kegiatan.

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi target Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mencapai kinerja $\geq 100\%$, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 112,11%.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Tahun 2022 tidak hanya menjadi momen kebangkitan Bangsa Indonesia pasca Pandemi Covid-19, tapi secara khusus bagi Provinsi Papua Barat juga menjadi momen penting ditetapkannya provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya.

Sehingga ke depannya, untuk sementara waktu wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melingkupi 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Perubahan-perubahan tersebut menjadi tantangan lebih untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk menunjang kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Menjalinkan kerja sama (MoU) dengan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan dan mempererat hubungan kerja sama dengan mitra kerja (*stakeholders*) baik di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya melalui koordinasi dan sinergi.
3. Meningkatkan kompetensi SDM Perwakilan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengawasan;
4. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut atas saran/rekomendasi/Area of Improvement (AOI) atas hasil pengawasan BPKP.

KILAS PERISTIWA BIDANG IPP TAHUN 2022

Percepatan Pembangunan Papua Barat



Pengawasan dan Focus Group Discussion dengan tema Percepatan Pembangunan Papua Barat

Infrastruktur



Pengawasan pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua Barat melalui pengawasan pembangunan PSN Siboru, Program Pamsimas, dan proyek pembangunan Jalan dan Jembatan

Kesehatan



Pengawasan penanggulangan pandemi COVID-19 dan Sistem kesehatan di Provinsi Papua Barat

Bansos (BPNT, BLT-BBM, PKH)



Pengawasan program perlindungan sosial melalui bantuan sosial antara lain BPNT, PKH, BLT-BBM.

P3KE



Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat. Pengawasan dilakukan pada program padat karya yang melibatkan masyarakat, program peningkatan keterampilan usaha, dan pemberian bantuan sosial dalam rangka penurunan beban pengeluaran.